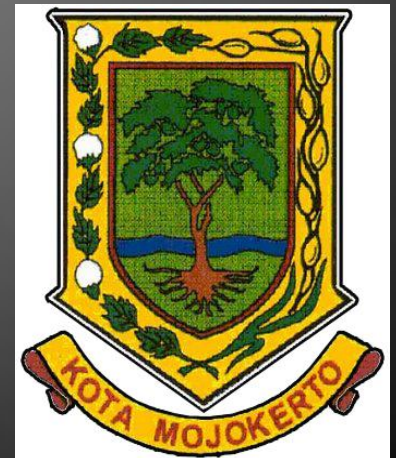




RENCANA KERJA 2017



BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Renja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, Rencana Kerja SKPD (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini semoga dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Mojokerto, Maret 2016
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**

Drs. HERU SETYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19640501 199203 1 011

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TH 2015 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2015 dan Capaian Renstra SKPD | 4 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 8 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD | 11 |
| 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembagunan Daerah | 11 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 15 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 17 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD..... | 18 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 18 |
| BAB IV PENUTUP | |
| Penutup..... | 25 |

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

DAFTAR TABEL

| | | Hal |
|---------|--|-----|
| Tabel 1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Mojokerto.. | 5 |
| Tabel 2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pem-..... Bangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 9 |
| Tabel 3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota... Mojokerto | 12 |
| Tabel 4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepen- Tingan Tahun 2017 Kota Mojokerto..... | 16 |
| Tabel 5 | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kota Mojokerto..... | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2017. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2014-2019 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan

misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2017 ini adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2017 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Mengingat tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha peningkatan sarana prasarana pengembangan budaya dan pariwisata di Kota Mojokerto maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bagian Administrasi Pembangunan selalu berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Dalam penyusunan Renja 2017 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2015. Evaluasi Renja 2015 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2015 adalah seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2014 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2015) | | | Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2016) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2016) | | |
|------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|----|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (2015) | Realisasi Renja SKPD Tahun (2015) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | | Bidang urusan Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 15 | Program Pengembangan data/Informasi | Meningkatnya kualitas transparansi daerah | | | | | | | |
| 1 | 06 | 15 | 05 | Penyusunan profile daerah | Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan | 5 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |
| 1 | 06 | 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan | | | | | | | |
| 1 | 06 | 21 | 19 | Penyusunan rencana kerja (renja) dan RKA SKPD | Persentase kesesuaian Renja dengan ketentuan | 5 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 1 | 20 | | | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 01 | 01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terbayarnya uang lembur pegawai | 1200 jam | 1200 jam | 1200 jam | 1200 jam | 100 | 1200 jam | 1200 jam | 100 |
| 1 | 20 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya honor pengelola keuangan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 10 | Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 01 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 17 | 01 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Tersusunnya buku HSPK | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |
| 1 | 20 | 17 | 02 | Penyusunan standar satuan harga | Tersusunnya buku SHSB dan SHSBGN | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|
| 1 | 20 | 17 | 12 | Penyusunan sistim informasi keuangan daerah | Terlaksananya operasional ULP | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60 |
| 1 | 20 | 17 | 13 | Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah | Tersusunnya buku petunjuk pengendalian pelaksanaan kegiatan | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |
| 1 | 20 | 17 | 31 | Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran | Tersusunnya laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Meningkatnya tertib administrasi kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20 | 03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 3 dokumen | 60 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD, dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Kota Mojokerto bahwa tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan pada intinya adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan potensi budaya dan pariwisata Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya Bagian Administrasi Pembangunan bekerjasama/berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Administrasi Pembangunan
Kota Mojokerto

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2015 (thn n-2) | Tahun 2016 (thn n-1) | Tahun 2017 (thn n) | Tahun 2018 (thn n+1) | Tahun 2015 (thn n-2) | Tahun 2016 (TW I) (thn n-1) | Tahun 2017 (thn n) | Tahun 2018 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase kesesuaian Renja dengan ketentuan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | |
| 3 | Terbayarnya uang lembur pegawai | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | |
| 4 | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 5 | Terbayarnya honor pengelola keuangan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 6 | Terpeliharanya peralatan kerja | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 7 | Tersedianya alat tulis kantor | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 8 | Tersedianya barang cetakan | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 9 | Tersedianya komponen instalasi listrik | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 10 | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 11 | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 12 | Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 13 | Tersusunnya buku HSPK | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 14 | Tersusunnya buku SHSB dan SHSBGN | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------|------|------|------|------|-----|------|------|--|
| 15 | Terlaksananya operasional ULP | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 16 | Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 17 | Tersusunnya laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |
| 18 | Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD maupun lintas SKPD ;
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ;
3. Masih dinilai lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Mojokerto ;
4. Masih banyak terdapat lelang ulang dikarenakan lelang gagal
5. Keberadaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah kota sehingga pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai dengan rencana ;
6. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal ;

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pencapaian program/kegiatan terhadap rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dari bagian Administrasi Pembangunan. Setiap program/kegiatan yang dilaksanakan selalu dievaluasi apakah program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dari tahun ke tahun kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Pembangunan berperan sebagai supporting staf. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2016
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan

| No | Rancangan Awal RKPd | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|----------------|---|----------------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Urusan Wajib | Kota Mojokerto | | | | Urusan Wajib | Kota Mojokerto | | | | |
| | Bidang urusan Perencanaan Pembangunan | Kota Mojokerto | | | | Bidang urusan Perencanaan Pembangunan | Kota Mojokerto | | | | |
| | Program Pengembangan data/informasi | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas transparansi daerah | 100% | | Program Pengembangan data/informasi | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas transparansi daerah | 100% | | |
| | Penyusunan profile daerah | Kota Mojokerto | Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan | 100% | 5.000.000 | Penyusunan profile daerah | Kota Mojokerto | Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan | 100% | 5.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan | 100% | | Program perencanaan pembangunan daerah | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan | 100% | | |
| | Penyusunan rencana kerja (renja) dan RKA SKPD | Kota Mojokerto | Persentase kesesuaian Renja dengan ketentuan | 100% | 5.000.000 | Penyusunan rencana kerja (renja) dan RKA SKPD | Kota Mojokerto | Persentase kesesuaian Renja dengan ketentuan | 100% | 5.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Mojokerto | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Mojokerto | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Mojokerto | Terbayarnya uang lembur pegawai | 100% | 24.420.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Mojokerto | Terbayarnya uang lembur pegawai | 100% | 24.420.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|-------------|---|----------------|--|------|-------------|--|
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai | 100% | 57.139.200 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai | 100% | 57.139.200 | |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kota Mojokerto | Terbayarnya honor pengelola keuangan | 100% | 50.400.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kota Mojokerto | Terbayarnya honor pengelola keuangan | 100% | 50.400.000 | |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Mojokerto | Terpeliharanya peralatan kerja | 100% | 23.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Mojokerto | Terpeliharanya peralatan kerja | 100% | 23.000.000 | |
| Penyediaan Alat tulis kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya alat tulis kantor | 100% | 22.446.000 | Penyediaan Alat tulis kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya alat tulis kantor | 100% | 22.446.000 | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Mojokerto | Tersedianya barang cetakan | 100% | 10.930.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Mojokerto | Tersedianya barang cetakan | 100% | 10.930.000 | |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya komponen instalasi listrik | 100% | 1.644.500 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya komponen instalasi listrik | 100% | 1.644.500 | |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | 100% | 10.343.650 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | 100% | 10.343.650 | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah | 100% | 284.550.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah | 100% | 284.550.000 | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah | 100% | 18.600.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah | 100% | 18.600.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kota Mojokerto | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas | 100% | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kota Mojokerto | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas | 100% | | |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya almari besi untuk ULP | 100% | 50.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya almari besi untuk ULP | 100% | 50.000.000 | |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya Mesin Fotocopy | 100% | 35.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya Mesin Fotocopy | 100% | 35.000.000 | |
| Pengadaan komputer dan kelengkapannya | Kota Mojokerto | Tersedianya Printer | 100% | 10.000.000 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya | Kota Mojokerto | Tersedianya Printer | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 100% | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 100% | | |
| Penyusunan Analisa Standar Belanja | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku HSPK dan ASN 2017 | 100% | 517.589.100 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku HSPK dan ASN 2017 | 100% | 517.589.100 | |
| Penyusunan standar satuan harga | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku SSH 2017 | 100% | 275.071.550 | Penyusunan standar satuan harga | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku SSH 2017 | 100% | 275.071.550 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|-------------|-------------|--|----------------|---|-------------|-------------|--|
| | Penyusunan sistim informasi keuangan daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya operasional ULP | 100% | 137.453.500 | Penyusunan sistim informasi keuangan daerah | Kota Mojokerto | Terlaksananya operasional ULP | 100% | 137.453.500 | |
| | Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan 2017 | 100% | 161.786.550 | Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan 2017 | 100% | 161.786.550 | |
| | Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran | Kota Mojokerto | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Pemkot Mojokerto | 100% | 284.637.000 | Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran | Kota Mojokerto | Tersusunnya laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | 100% | 284.637.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kota Mojokerto | Meningkatnya tertib administrasi kegiatan | 100% | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kota Mojokerto | Meningkatnya tertib administrasi kegiatan | 100% | | |
| | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Kota Mojokerto | Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan | 100% | 123.779.600 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Kota Mojokerto | Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan | 100% | 123.779.600 | |
| | | | | | | | | | | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum SKPD berkoordinasi dengan Bappeko. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD. Bagian Administrasi Pembangunan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Pembangunan berperan sebagai supporting staf.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Sebagai unsur Unit kerja dari Sekretariat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan potensi budaya dan pariwisata Kota Mojokerto.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut Bagian Administrasi Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan mengalami perubahan, karena sejak Juni 2015 telah berdiri Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto yang akan mengambil alih semua kegiatan kepariwisataan yang semula dibawah kendali Bagian Administrasi Pembangunan. Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan yang terkait erat dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali ;
2. Terwujudnya pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penyerahan kegiatan yang tepat waktu ;
3. Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabel secara elektronik.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya buku pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, Harga Satuan pokok Kegiatan dan Standart Harga Satuan Barang ;
- 2) Meningkatnya ketertiban pelaporan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 3) Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan semula mempunyai 8 Program Kerja namun sejak Juni 2015, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto telah berdiri, sehingga seluruh program kerja bidang kepariwisataan (2 program/kegiatan) yang semula berada di Bagian Administrasi Pembangunan diambil alih oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, imbasnya program kerja di Bagian Administrasi Pembangunan tersisa 6 program kerja meskipun belum ada perubahan Tupoksi. Pada Renja 2017, Program Pengembangan Data/Informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilebur menjadi 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sedangkan program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur yang kegiatannya adalah belanja modal, untuk lingkungan Sekretariat Daerah dikelola satu pintu oleh Bagian Umum jadi untuk tahun 2017 tersisa 4 program/kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada bagian Administrasi Pembangunan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 277.831.080,- kegiatannya meliputi :
 1. Penyediaan Jasa surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan logistik kantor

- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 10.000.000,- kegiatannya meliputi :
 1. Penyusunan Renja dan RKA SKPD
 2. Penyusunan Profil SKPD

- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 1.649.950.000,- kegiatannya meliputi :
 1. Penyusunan analisa standar belanja
 2. Penyusunan standar satuan harga
 3. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
 4. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

- 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 133.100.000,- kegiatannya meliputi :

1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Mojokerto

| Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggungja wab |
|------|----|---|----|----|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | Urusan Rutin | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | | | | | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatny a pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Terbayarnya uang lembur pegawai | 12 bulan | Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 32.670.000 | 35.937.000 | Baru | Bag.Adm.Pem bangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatny a pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai | 12 bulan | Terawatnya kendaraan dinas | 12 bulan | 70.180.000 | 77.198.000 | Baru | Bag.Adm.Pem bangunan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|---|------------------|--|----------------|---|----------|---|----------|--|----------|-------------|-------------|------|---------------------|
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Terbayarnya honor pengelola keuangan | 12 bulan | Terpenuhinya honor pengelola keuangan | 12 bulan | 102.061.080 | 112.267.188 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Terpeliharanya peralatan kerja | 12 bulan | Terpeliharanya peralatan kerja di Bag.Adm.Pemb | 12 bulan | 26.620.000 | 29.282.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 10 | Penyediaan Alat tulis kantor | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai | 12 bulan | 22.385.000 | 24.623.500 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Tersedianya barang cetakan | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 12.100.000 | 13.310.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik | 12 bulan | 1.815.000 | 1.996.500 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 3 | 05 | 01 | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan | 12 bulan | 10.000.000 | 10.000.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|------------------|--|----------------|---|----------|--|----------|--|----------|-------------|-------------|------|---------------------|
| 1 | 20 | 03 | 05 | 06 | 09 | Penyusunan Renja dan RKA SKPD | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan | 12 bulan | Tersusunnya renja dan RKA SKPD | 12 bulan | Terwujudnya perencanaan berbasis kinerja sesuai target yang ditetapkan | 12 bulan | 5.000.000 | 5.000.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 06 | 10 | Penyusunan Profil SKPD | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya kualitas transparansi daerah | 12 bulan | Tersusunnya Profil SKPD | 12 bulan | Terpenuhiya kebutuhan informasi program kerja dan capaian kinerja Bag.Adm.Pemb | 12 bulan | 5.000.000 | 5.000.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Urusan Prioritas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | 01 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Tersusunnya buku HSPK dan ASB | 12 bulan | Terpenuhiya kebutuhan pedoman penyusunan rencana kegiatan SKPD | 12 bulan | 572.000.000 | 629.200.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | 02 | Penyusunan standar satuan harga | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Tersusunnya buku SSH | 12 bulan | Terpenuhiya kebutuhan pedoman penyusunan rencana kegiatan SKPD | 12 bulan | 302.500.000 | 332.750.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | 12 | Penyusunan sistim informasi keuangan daerah | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Terlaksananya operasional ULP | 12 bulan | Terselenggaranya pengadaan b/j yang transparan dan akuntabel | 12 bulan | 300.000.000 | 400.000.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | 29 | Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan | 12 bulan | Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran | 12 bulan | 175.450.000 | 192.995.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|--|------------------|--|----------------|---|----------|---|----------|---|----------|----------------------|----------------------|------|---------------------|
| 1 | 20 | 03 | 05 | 17 | 31 | Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Tersusunnya laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | 12 bulan | Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel | 12 bulan | 300.000.000 | 300.000.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | 20 | 03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Prioritas Daerah | | Kota Mojokerto | Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan | 12 bulan | Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan | 12 bulan | Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel | 12 bulan | 133.100.000 | 146.410.000 | Baru | Bag.Adm.Pembangunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Total : | | | | | | | | | | 2.070.881.080 | 2.315.969.188 | | |

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang disusun berdasarkan Renstra yang mengacu pada RPJM Kota Mojokerto Tahun 2014-2019. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2014-2019 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2017.

Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen pendukung antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berwawasan kedepan;

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang merupakan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto periode 2014-2019.

Mojokerto, Maret 2016

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**

Drs. HERU SETYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19640501 199203 1 011